

**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING*, DANA PIHAK
KETIGA, *FINANCIAL TO FUNDING RATIO*, RASIO
INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN
PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
TERHADAP LIKUIDITAS**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi Syariah (M.E)



Oleh:

WIWIN YUSTINA

NPM. 1760102034

**Program Studi Ekonomi Syariah
Konsentrasi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1442 H/ 2021 M**

**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING*, DANA PIHAK
KETIGA, *FINANCIAL TO FUNDING RATIO*, RASIO
INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN
PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
TERHADAP LIKUIDITAS**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi Syariah (M.E)



Oleh:

WIWIN YUSTINA

NPM. 1760102034

**Program Studi Ekonomi Syariah
Konsentrasi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah**

Pembimbing I : Dr. Heni Noviarita, M. Si
Pembimbing II : Dr. Erike Angraeni, S.E., M. E. Sy

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1442 H/ 2021 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan bank yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan Al-Quran dan hadits. Tujuan utama dari perbankan syariah adalah menerapkan prinsip-prinsip Islam. perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah mempunyai karakter unik yaitu dalam pengambilan keuntungannya bukan dari bunga melainkan nisbah bagi hasil. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ...

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi...”² (Al-Jumu'ah (62): 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan-mu...”³ (Al-Baqarah (2): 198)

Dari ayat diatas, Allah SWT mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.⁴ Secara umum tugas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian dana yang telah terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat, maka

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 554.

³*Ibid.*, hlm. 31.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 96.

bank memiliki keharusan untuk meyakinkan nasabah bahwa uang yang mereka titipkan dijamin keamanannya.⁵ Sayangnya, lingkungan berpenghasilan rendah menimbulkan kekhawatiran tentang akses ke layanan keuangan.⁶ Dengan demikian, Masyarakat perlu mendapat informasi yang memungkinkan bagi mereka untuk mengetahui kondisi bank, terutama ketika bank melakukan merger, ada kekhawatiran pengurangan kredit usaha kecil.⁷ Secara sederhana kondisi tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan bank syariah yang bersangkutan.

Berikut ini merupakan data empiris mengenai likuiditas perbankan syariah. Data tersebut merupakan data triwulan periode tahun 2018-2019.

Tabel 1.2 Likuiditas/FDR Perbankan Syariah

No	Kode	Financing to Deposit Ratio			
		Juli-Sep 2018	Okt-Des 2018	Jan-Mar 2019	Apr-Jun 2019
1	147	79,03	73,18	71,17	68,05
2	405	90,60	82,78	81,38	77,84
3	451	79,08	77,25	79,39	81,63
4	422	76,41	75,49	79,55	85,25
5	427	80,03	79,62	76,42	87,07
6	506	79,08	90,88	99,23	99,23
7	517	93,44	88,82	98,87	94,66
8	521	91,48	93,40	84,00	86,40
9	536	89,43	88,99	86,76	87,31
10	547	96,03	95,60	96,03	96,17
11	128	68,79	98,93	73,57	78,43
12	425	96,66	89,85	93,83	91,25

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan diolah tahun 2021

⁵ Friedline, T., Franklin, T., Morrow, S., & Kugiya, J. (2020). Janji dan bahaya kesepakatan manfaat masyarakat: bukti dari komentar publik hingga merger bank besar. *Jurnal Praktek Komunitas* , 28 (4), hlm, 337–355

⁶ Ding, L., & Reid, CK (2020). Community Reinvestment Act (CRA) dan Pola Percabangan Bank. *Debat Kebijakan Perumahan* , 30 (1), hlm, 27–45

⁷ Jagtiani, J., Kotliar, I., & Maingi, RQ (2016). Merger bank komunitas dan dampaknya terhadap pinjaman usaha kecil. *Jurnal Stabilitas Keuangan* , 27 (Desember 2013), 106-121.

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio FDR adalah 78% hingga 92%.⁸ Jika angka rasio FDR suatu bank berada pada angka dibawah 70% (misalkan 60%), maka bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang dihimpun. Jika dengan rasio FDR 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Sebaliknya, Dengan FDR 100% atau 110% menandakan bank menyalurkan dana melebihi batas DPK yang dimiliki dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank akan semakin banyak. Tetapi semakin tinggi Rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat.

Pengelolaan likuiditas dalam lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang menjadi prioritas. Lembaga perbankan harus senantiasa memelihara kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam waktu yang telah ditentukan.⁹ Kinerja keuangan bank sangat penting untuk menilai kesehatan bank. Dalam hal ini, Perbankan Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia semakin agresif untuk meningkatkan kinerjanya. Persaingan semakin ketat terutama dalam mengejar pangsa pasar Perbankan Syariah yang masih di bawah 6% dari total industri perbankan

⁸ PBI No. 15/15/PBI/2013

⁹ Siamat, Dahlan, 2003, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI. Hlm.102.

yang ada.¹⁰ Pesatnya pertumbuhan dan kinerja tersebut tentunya tidak membuat sistem perbankan syariah terbebas dari permasalahan seperti yang dialami oleh bank konvensional.¹¹ Namun parameter utama untuk mengukur kinerja perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang pesat.¹²

Kajian terbaru terkait kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dikaji selama periode 2014-2018 .¹³ Kajian lainnya adalah analisis komparatif bank syariah dan bank konvensional¹⁴ dan analisis rasio likuiditas bank syariah pada masa Pandemi Covid 19.¹⁵ Sementara untuk periode 2019, belum banyak ditemukan penelitian khususnya Perbankan Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian sebelumnya juga berfokus pada pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap kinerja keuangan perbankan syariah¹⁶ dan perkembangan perbankan syariah serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional.¹⁷

Penelitian lain terkait temuan bahwa besaran *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang disalurkan (Kristina, Ketut, & Dewi, 2021). Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa selain pembiayaan perbankan syariah,

¹⁰ Syafril, H. (2018). *Penentu kinerja keuangan bank syariah di indonesia selama periode 2014-2018: analisis keuangan berdasarkan metodologi unta* . 578.

¹¹ Kisman, Z. (2020). Manajemen Risiko: Studi Banding antara Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* , 3 (1).

¹² Umiyati, LMMK (2020). Islamic Corporate Governance dan Kepatuhan Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Al-IQTISHAD: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* , 12 no. 1 (Jan_juni 2020), 33–50.

¹³ Ibid, hlm 34-56

¹⁴ Riantani, S., & Dyahrini, W. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Komputer dan Matematika Turki* , 12 (8), 911–916.

¹⁵ Taujiharrahman, D., Yuningrum, H., Yahya, I., Zaki Fuadi, N., & Hartono, S. (2021). Analisis Rasio Likuiditas Bank Syariah Selama Pandemi Virus Covid-19

¹⁶ Istan, M., & Fahlevi, M. (2020). Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* , 21 (1)

¹⁷ Fitriyah, TN (2020). Perkembangan Perbankan Syariah dan Kontribusinya dalam Pembangunan Perbankan Nasional. *Jurnal Internasional Islam Nusantara* , 8 (1), hlm, 10–18

sumber dananya adalah dana pihak ketiga (Hughes et al., 2019)¹⁸ Temuan lain mengungkapkan bahwa pertumbuhan DPK tidak berpengaruh terhadap LDR (Nugroho, Arif, & Halik, 2021).¹⁹ Penyaluran pembiayaan dengan menambahkan komponen surat berharga ke dalam perhitungan, sehingga bank dapat menyalurkan dananya tidak hanya melalui kredit/pembiayaan riil tetapi juga dengan surat berharga. Secara parsial, nilai tukar Rupiah dan Mobil berpengaruh negatif terhadap ROA (Rini, Balafif, & Imamah, 2021).²⁰

Non Performing Financing merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank. Besar kecilnya *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang disalurkan. Semakin besar tingkat *Non Performing Financing* menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya, memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian pembiayaan pada bank.²¹ Ketika bank mengalami kenaikan dalam jumlah kredit/pembiayaan bermasalah, maka bank tersebut akan menahan diri dalam

¹⁸ Hughes, L., Dwivedi, YK, Misra, SK, Rana, NP, Raghavan, V., & Akella, V. (2019). Penelitian, praktik, dan kebijakan Blockchain: Aplikasi, manfaat, batasan, tema penelitian yang muncul, dan agenda penelitian. *Jurnal Internasional Manajemen Informasi* , 49 (Februari), 114–129

¹⁹ Nugroho, M., Arif, D., & Halik, A. (2021). Pengaruh provisi kerugian pinjaman, kredit bermasalah dan dana pihak ketiga terhadap rasio kecukupan modal. *Akuntansi* , 7 (4), 943–950

²⁰ Rini, RDP, Balafif, M., & Imamah, N. (2021). Pengaruh Tingkat Inflasi, Kurs IDR, CAR dan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2017. *Bharanomi* , 1 (2), 104-113

²¹ Lisa Marlina JN dan Mia Angelina Setiawan. *Pengaruh Kurs, Inflasi, Dana Pihak Ketiga (Dpk), Pendapatan Bank, Capital Adequacy Ratio (Car), Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Umum Syariah Non Devisa Periode 2014-2018* Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 3, Seri E, Agustus 2019, hlm 1477

penyaluran kredit/pembiayaan dan membenahi kolektibilitas yang rendah dari kredit/pembiayaan yang telah disalurkaninya tersebut.²²

Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank dan dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya. Dana Pihak ketiga atau dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut terdiri dari beberapa jenis yaitu giro, deposito dan tabungan. Hasil penelitian Nandadipa dan Prastiono (2010)²³ pertumbuhan DPK tidak berpengaruh terhadap LDR. Satria dan Subegti (2010)²⁴ pada penelitiannya tidak menemukan bukti bahwa DPK berpengaruh terhadap LDR. Secara teori, semakin besar DPK membuat rasio FDR menurun. Hal ini terjadi karena likuiditas bank syariah meningkat setelah bertambahnya DPK. Hal ini bahwa meningkatnya DPK tidak selalu menyebabkan likuiditas yang baik pada perbankan.

Financial To Funding Ratio merupakan kebijakan penyesuaian ketentuan FFR dengan memperluas komponen pendanaan agar mendorong penyaluran pembiayaan dengan menambahkan komponen surat berharga ke dalam perhitungan, sehingga bank dapat menyalurkan pendanaannya bukan hanya melalui kredit/pembiayaan riil tetapi juga dengan surat berharga. Dengan menyalurkan dananya kepada instrumen tertentu dapat dikatakan bahwa bank memperoleh keuntungan dengan risiko

²²Sony Kristiyantodan Sugeng Widodo, *Analisa Intermediasi Makroprudensial Pada Bank Berdampak Sistemik di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Dewantara, Vol. 3 No. 1, Januari 2020-Juli 2020 hlm, 51

²³Nandadipa, Seandy dan Prastiono, 2010. *Analisis Pengaruh CAR, NPL, INFLASI, Pertumbuhan DPK, dan Exchange Rate terhadap LDR*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, dipublikasikan.

²⁴Satria & Subegti, R. B, 2010. *Determinasi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia Periode 2006-2009*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 14, No.3, September.

rendah. Maharani Ika Lestari & Toto Sugiharto²⁵ (2007) Suku Bunga SBI berpengaruh terhadap LDR. Pontes dan Sol Murta.²⁶ bahwa perkembangan kredit, surat berharga pemerintah mempengaruhi keputusan likuiditas bank.

Kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan kepada sektor riil sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Dalam perhitungannya, Rasio Intermediasi Makroprudensial ini akan memasukkan surat-surat berharga yang dibeli oleh bank sebagai penyaluran pembiayaan pinjaman selain melalui pembiayaan.²⁷

Penyangga Likuiditas Makroprudensial merupakan cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dan BUS dalam bentuk surat berharga instrument yang bersifat countercyclical dan time varying. Cadangan likuiditas suatu bank pada umumnya merupakan jaminan atau tindakan berjaga-jaga atas kemungkinan terjadinya kewajiban membayar akibat peningkatan penarikan dana maupun peningkatan giro wajib minimum (GWM). Beberapa bank memilih melakukan strategi untuk memiliki likuiditas yang berlebih sebagai sinyal kepada pasar bahwa bank tersebut memiliki likuiditas yang kuat. Di lain sisi, kelebihan likuiditas dapat juga

²⁵Maharani, Ika Lestari dan Sugiharto, Toto. 2007. "*Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*". Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil). Vol.2. A195-201.

²⁶ Pontes, G. and Sol Murta, F. 2012. The determinants of the bank's excess liquidity and the credit crisis: the case of Cape Verde. Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

²⁷Dhea Ade Sri Handayani dan Nurdin, Pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) terhadap Return on Asset (ROA) pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Volume 5, No. 1, Tahun 2019, h 190

diinterpretasikan bahwa bank memiliki pengelolaan likuiditas yang buruk sehingga tidak optimal dalam mengelola portofolio asset dan liabilitas.²⁸

Dari berbagai literatur ditemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas perbankan syariah, maka peneliti melakukan penelitian lebih dalam. Penelitian ini berfokus pada Financial to Deposit Ratio, yaitu Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Financial To Funding Ratio, Macroprudential Intermediation Ratio, dan Macroprudential Liquidity Buffers. Ini merupakan kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengangkat judul **“Pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, *Financial To Funding Ratio*, Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Terhadap likuiditas.**

²⁸ Gantiah Wuryandani, dkk. pengelolaan dana dan likuiditas bank. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Januari 2014. Hlm 248.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latarbelakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing*, Terhadap likuiditas?
2. apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap likuiditas?
3. Apakah terdapat pengaruh *Financial To Funding Ratio* terhadap likuiditas?
4. apakah terdapat pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial (terhadap likuiditas?
5. apakah terdapat pengaruh Penyangga Likuiditas Makroprudensial Terhadap likuiditas?
6. apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, *Financial To Funding Ratio*, Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial secara bersama-sama terhadap likuiditas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan:

1. untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* terhadap likuiditas.
2. untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap likuiditas.
3. untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Financial To Funding Ratio* terhadap likuiditas.
4. untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial terhadap likuiditas.
5. untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Penyangga Likuiditas Makroprudensial terhadap likuiditas.
6. untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, *Financial To Funding Ratio*, Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial secara bersama-sama terhadap likuiditas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan beberapa manfaat:

1. bagi perusahaan dalam hal ini Perbankan Syariah dapat mengetahui pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, *Financial To Funding Ratio*, Rasio Intermediaansi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial terhadap likuiditas dan membantu dalam rangka mengambil keputusan.
2. bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk pengembangan terhadap penelitian khususnya mengenai pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, *Financial To Funding Ratio*, Rasio Intermediaansi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial terhadap likuiditas, serta dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. bagi pemerintah dapat memberikan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan bagi regulator perbankan yaitu Bank Indonesia (BI).
4. bagi peneliti sendiri adalah menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dan referensi baru mengenai pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, *Financial To Funding Ratio*, Rasio Intermediaansi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Terhadap likuiditas,

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Dasar (*Grand Theory*)

Setiap pihak yang memiliki hubungan dengan perbankan sangat berkepentingan dengan informasi kinerja keuangan perbankan. Pentingnya pengukuran kinerja dapat dijelaskan dengan teori sinyal (*signaling theory*). Menurut Brigham dan Houston, isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis, baik untuk keadaan masa lalu saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan.²⁹ Informasi yang diterima oleh investor terlebih dahulu diterjemahkan sebagai sinyal yang baik (*good news*) atau sinyal yang jelek (*bad news*).

Kinerja keuangan perbankan dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan pada sektor perbankan syariah, sama seperti sektor lainnya, adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank

²⁹ Eugene F Brigham dan Joel F Houston, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 36.

yang bermanfaat dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik merupakan signal atau tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik.

Signal baik akan direspon dengan baik pula oleh pihak luar, karena respon pasar sangat tergantung pada signal fundamental yang dikeluarkan perusahaan.³⁰ Investor hanya akan menginvestasi modalnya jika menilai perusahaan mampu memberikan nilai tambah atas modal yang diinvestasikan lebih besar dibandingkan jika menginvestasikannya di tempat lain. Untuk itu, perhatian investor diarahkan pada kemampuan perbankan syariah yang tercermin dari laporan keuangan yang diterbitkan perbankan syariah.

B. Likuiditas Perbankan Syariah

Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai.³¹ S. Munawir, berpendapat bahwa likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Dengan kata lain, bahwa Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Terutama kewajiban dana jangka pendek. kewajiban-kewajibannya tersebut diantaranya:

- a. Menutup jumlah *reserves required*.

³⁰ Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Yogyakarta: BPPE UGM, 2000), h. 570.

³¹ Fahmi, Irham. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta. 2015, Hlm 59

- b. Membayar chek, giro berbunga, tabungan dan deposito berjangka milik nasabah yang diuangkan kembali.
- c. Menyediakan dana kredit yang diminta calon debitur sehat, sebagai bukti bahwa mereka tidak menyimpang dari kegiatan utama bank yaitu pemberian kredit.
- d. Menutup berbagai macam kewajiban segera lainnya.
- e. Menutup kebutuhan biaya operasional perusahaan.

Manajemen Likuiditas Bank adalah suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Dalam melakukan kegiatan bank, manajemen likuiditas bank memegang peranan yang sangat penting, karena sesuai dengan data empiris bahwa sebagian besar bank dananya berasal dari Pihak Ketiga dan Pihak Kedua, yang berasal dari Modal tidak lebih dari 10% dari seluruh sumber dana bank.³²

1. Fungsi Likuiditas

Likuiditas tidak hanya menunjukkan kemampuan dari suatu bank dalam melunasi utang jangka pendeknya saja. Likuiditas juga mempunyai manfaat dan fungsi lain yang sangatlah penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas mempunyai manfaat untuk membantu proses analisa dan interpretasi keuangan dalam jangka waktu pendek. Dengan mengetahui tingkat likuiditasnya maka sebuah bank akan bisa memperbaiki kondisi keuangan saat diketahui ada hal yang bisa membuat kinerja dari bisnis pada perusahaan menjadi kurang maksimal

³² Riyadi, Slamet. *Banking Assets and Liability Management*, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004. Hlm, 27.

dan efisien. Fungsi utama likuiditas dapat digolongkan sebagai berikut :³³

- a. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum
- b. Untuk menjaga agar saldo rekening yang ada pada bank koresponden selalu berada pada jumlah yang ditentukan
- c. Untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah.

2. Jenis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara lancar dan tepat waktu sehingga likuiditas sering disebut *short term liquidity*.³⁴ Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pada saat ditagih.

Pada penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah rasio Financing To Deposit Ratio (FDR). Penilaian kesehatan likuiditas bank yang berupa Financial to Deposit Ratio rumus rasio Financing To Deposit Ratio (FDR) sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{DPK}}$$

Peraturan tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui pertumbuhan pembiayaan

³³ Shopy Nadia. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah*. 2010. Hlm 27

³⁴ Fahmi, Irham. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta. 2015, Hlm 59.

perbankan, dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan GWM melalui perhitungan *Financial to Deposit Ratio* (FDR).

3. Faktor yang mempengaruhi likuiditas

Perkembangan dan kondisi likuiditas perbankan selain dipengaruhi oleh kegiatan usaha bank juga dipengaruhi oleh sistem dalam pasar uang. Melalui pasar uang yang tersedia, bank dapat melakukan pengelolaan likuiditas baik dalam kondisi kekurangan maupun kelebihan likuiditas.

Pasar uang di suatu negara ditentukan oleh struktur pasar, instrumen yang tersedia, perkembangannya, regulasi, dan kondisi likuiditas pasar. Penghimpunan dan pengelolaan dana perbankan mempengaruhi keputusan likuiditas perbankan.³⁵ Secara garis besar kondisi likuiditas bank dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah *uncontrollable factor* sedangkan faktor internal pada umumnya adalah yang bisa dikendalikan oleh bank. Faktor eksternal antara lain kondisi ekonomi dan moneter, Karakteristik depositan, kondisi pasar uang, peraturan, dll.

Penilaian suatu bank dari aspek likuiditas dapat dilihat dengan menggunakan Rasio *Financing To Deposit Ratio* (FDR). Dalam perhitungan analisis rasio likuiditas dengan FDR maka dapat diketahui seberapa jauh bank dapat memenuhi permintaan pembiayaan kepada nasabah, sehingga bank dapat mengimbangi kewajibannya untuk dapat segera memenuhi permintaan depositan yang ingin menarik kembali

³⁵ Gantiah Wuryandani dkk. *pengelolaan dana dan likuiditas bank*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Januari 2014. Hlm 264

uangnya yang telah digunakan untuk pembiayaan.³⁶ Likuiditas bank dalam beberapa penelitian diukur dengan menggunakan variabel *Financing To Deposit Ratio* (FDR).

Financing To Deposit Ratio (FDR) menggambarkan besarnya jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan ke pada masyarakat. Menurut Bank Indonesia, penilaian aspek likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk mengelola tingkat likuiditas yang memadai guna memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Disamping itu, bank juga harus dapat menjamin kegiatan dikelola secara efisien, dalam arti bahwa bank dapat menekan biaya pengelolaan likuiditas yang tinggi serta setiap saat bank dapat melikuidasi assetnya secara cepat dengan kerugian yang minimal.³⁷

Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa kemampuan likuiditas bank dapat diproksikan dengan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) yaitu perbandingan antara pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga.

Hal ini berarti menunjukkan tingkat likuiditas semakin kecil dan sebaliknya, karena sumber dananya (deposit) yang dimiliki telah habis digunakan untuk membiayai *financing portofolio* pembiayaannya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank

³⁶ Dendawijaya, L. (2015). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indah.

³⁷ Ibid, hlm 102

yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Pembiayaan yang diberikan tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio FDR adalah 78% hingga 92%.³⁸ Kemudian jika rasio FDR bank mencapai lebih dari 92 %, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik.

4. Pengelolaan likuiditas

Pengelolaan likuiditas bagi suatu bank mengacu pada kemampuan bank menyediakan dana dalam jumlah cukup, tepat waktu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya terutama memenuhi ketentuan bank sentral atau pemerintah, terbinanya hubungan baik dengan bank koresponden agar saldo seimbang, memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh penabung, pemilik rekening giro maupun debitur dan membayar kewajiban jangka panjang yang telah jatuh tempo.³⁹

Hal yang harus diperhatikan bank adalah bahwa likuiditas dan profitabilitas (kemampuan menghasilkan keuntungan) bank tidak selalu berjalan searah. Likuiditas yang berlebihan dapat menekan

³⁸ PBI No. 15/15/PBI/2013

³⁹ Nurul Ichsan. *Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah*. 2013. Hlm 82

profitabilitas.⁴⁰ Sementara kekurangan likuiditas akan mengakibatkan kerugian bagi bank karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhinya sehingga akan menyulitkan bank itu sendiri.

Bank akan menghadapi masalah *bank runs phenomenon* ketika tidak mampu memenuhi permintaan penarikan dana dari depositornya, pada keadaan tersebut bank menghadapi dilema apakah harus menginvestasikan dalam jangka pendek dan tidak menggunakan fungsi transformasi asetnya yang bersifat inefisiensi. Atau menghadapi *bank runs* ketika menginvestasikan dalam aset jangka panjang yang likuid.⁴¹

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengelola likuiditas, yaitu:

- a. Posisi likuiditas harian/mingguan harus dapat dijaga sesuai dengan ketentuan bank sentral.
- b. Memelihara alat likuiditas secukupnya agar bank selalu dapat melindungi kebutuhan kas keluar yang tidak terduga sebelumnya.
- c. Mengoperasikan kelebihan likuiditas secara efektif agar bank selalu dapat melindungi kebutuhan kas keluar yang tidak terduga sebelumnya.
- d. Menentukan besarnya *reserve* yang diperlukan dalam *primary reserve* dan *secondary reserve*.

Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap saat berupa penjagaan alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank, alat-alat likuid bank terdiri dari Uang tunai (KAS), Rekening Koran pada Bank Indonesia (BI), Jaminan kliring pada BI, Efek-efek (surat berharga).

Untuk menjaga likuiditas setiap bank harus memelihara perbandingan

⁴⁰Arthesa , Ade, dan Handiman, Edia. "Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank".PT Index, Jakarta, 2006. Hlm 190

⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 19

tertentu menurut ketentuan BI. Melalui ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) BI, setiap bank harus memiliki prosentase tertentu sekurang-kurangnya 5%. Batas minimum itu untuk mendeteksi kesehatan bank yang dihitung berdasarkan pembagian jumlah alat likuid dengan kewajiban yang dapat dibayar dalam suatu masa laporan.

Perangkat yang digunakan oleh bank syariah untuk memelihara likuiditasnya antara lain surat berharga pasar modal, ba'I dain, Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Islamic Interbank Money.⁴² Cadangan likuiditas suatu bank pada umumnya merupakan jaminan atau tindakan berjaga-jaga atas kemungkinan terjadinya kewajiban membayar akibat peningkatan penarikan dana maupun peningkatan giro wajib minimum (GWM).

Beberapa bank memilih melakukan strategi untuk memiliki likuiditas yang berlebih sebagai sinyal kepada pasar bahwa bank tersebut memiliki likuiditas yang kuat. Di lain sisi, kelebihan likuiditas dapat juga diinterpretasikan bahwa bank memiliki pengelolaan likuiditas yang buruk sehingga tidak optimal dalam mengelola *portofolio asset* dan *liabilitas*.⁴³

5. Kebutuhan Likiditas Bank Syariah

Giro Wajib Minimum (GWM) yang merupakan ketentuan Bank Indonesia. Giro Wajib Minimum merupakan kewajiban reserve (*reserve requirement*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar prosentase

⁴² Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Avabet, Jakarta, 2002. Hlm 9

⁴³ Gantiah Wuryandani, dkk. pengelolaan dana dan likuiditas bank. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Januari 2014. Hlm 248.

dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Perhitungan persentase GWM dilakukan berdasarkan jumlah harian saldo giro pada Bank Indonesia dan rata-rata harian jumlah DPK sebagai berikut:

Dana Pihak Ketiga meliputi seluruh DPK dalam rupiah ataupun valuta asing pada seluruh kantor bank yang bersangkutan di Indonesia. DPK Bank dalam bentuk rupiah meliputi kewajiban kepada pihak ketiga yang terdiri dari Giro *wadi'ah*, Tabungan mudharabah, Deposito investasi mudharabah, Kewajiban lainnya.

DPK dalam rupiah tersebut tidak termasuk dana yang diterima oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dari Bank Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat. DPK Bank dalam bentuk valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga termasuk bank dan Bank Indonesia yang terdiri dari giro *wadi'ah*, deposito investasi mudharabah, kewajiban lainnya.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai ketentuan Giro Wajib Minimum yang terbaru tahun 2008, pada tahun 2004 Bank Indonesia menentukan GWM untuk mata uang rupiah adalah 5% dari Dana Pihak Ketiga, sedangkan GWM valuta asing adalah 3% dari Dana Pihak Ketiga. GWM merupakan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, maka pelanggaran GWM akan dikenakan sanksi. Pelanggaran GWM terjadi apabila saldo harian Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia kurang dari saldo harian Rekening Giro Bank yang telah ditetapkan untuk pemenuhan GWM.

C. *Non Performing Financing*

1. **Pembiayaan**

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴⁴ Pihak yang dibiayai dan /atau diberi fasilitas dana diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, bahwa pembiayaan adalah proses penyaluran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya) kepada pihak yang kekurangan/membutuhkan dana (masyarakat/perusahaan). Pihak yang mendapatkan pembiayaan tersebut wajib mengembalikan dana tersebut baik itu imbalan atau keuntungan berupa bagi hasil yang telah disepakati.

Pembiayaan memiliki fungsi-fungsi. Adapun fungsi dari pembiayaan yaitu:⁴⁵

- a. Meningkatkan daya guna uang baik itu keperluan produktifitas ataupun untuk peningkatan produksi.
- b. Meningkatkan daya guna barang dengan adanya pembiayaan maka akan terjadinya perpindahan dari suatu barang yang mana dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

⁴⁴ Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm. 42.

⁴⁵ Ibid., Hlm. 19-21.

- c. Meningkatkan peredaran uang, dengan pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya.⁴⁶

2. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.⁴⁷ Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah, jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka akan menjadikan dampak buruk bagi kinerja bank tersebut.⁴⁸

Non Performing Finance (NPF) akan mempengaruhi tingkat kesehatan suatu perbankan. Fungsi penghitungan *Non Performing Finance* (NPF) antara lain:

- a. Sebagai cerminan resiko pembayaran untuk perbankan atau pihak investor
- b. Menjadi sinyal bagi perbankan untuk memiliki cadangan dana agar sewaktu-waktu jika nasabah ingin menarik uang. Sehingga kewajiban bank kepada nasabah terpenuhi.

Non Performing Financing (NPF) menunjukkan kolektabilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPF merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan

⁴⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 26-27.

⁴⁷ Ismail. 2011a. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana. *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Hlm 224

⁴⁸ *Ibid.* hlm 32

macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank. Besar kecilnya NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang disalurkan. Semakin besar tingkat NPF menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya, serta memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank.⁴⁹

Hal tersebut memberikan gambaran tentang masalah bank yang harus diatasi dengan segera agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi pihak bank sendiri. Alat ukur yang dapat digunakan adalah:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan bermasalah} \times 100 \%}{\text{Total Pembiayaan}}$$

NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin kecil tingkat NPF semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank atau dapat dikatakan pula semakin tinggi tingkat NPF pada suatu bank, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah tersebut semakin buruk.⁵⁰

Resiko pembiayaan meningkat, *margin* atau bunga kredit akan meningkat pula. Dalam perbankan Islam tidak mengenal instrumen bunga karena yang digunakan adalah margin atau bagi hasil itu pada keuntungan ataupun pada kerugian sesuai dengan kesepakatan.⁵¹ Resiko

⁴⁹ *Ibid.* hlm 147

⁵⁰ Diharpi Herli Setyowati. *Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Sebagai Dampak Inefisiensi Operasional*. Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)

⁵¹ Kamal, Rendy. (2014). *Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Sertifikat Bank Indonesia*

yang terjadi dari pembiayaan atau pinjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahan.⁵² Penilaian kualitas pembiayaan/kredit perbankan terbagi menjadi lima katagori, yaitu:⁵³

- a. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila terdapat tunggakan belum melampaui 90 hari
- b. Kurang Lancar (*substandard*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- c. Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari
- d. Kredit Macet yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok.

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian pembiayaan.⁵⁴ Dengan tidak terbayarnya pengembalian pembiayaan yang menjadi pembiayaan bermasalah tentu akan mempengaruhi pendapat bank. Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab pembiayaan macet adalah sebagai berikut :

Syariah (SBIS) Terhadap Laba Perbankan Syariah Di Indonesia Periode September 2009-Desember 2013. Skripsi Ilmu Ekonomi Dan pembangunan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

⁵² Muhamad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN. Hlm 267

⁵³ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat 3).

⁵⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2015), hlm. 92.

a. Faktor eksternal bank

- 1) Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang tidak beritikad baik
- 2) Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
- 3) Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
- 4) Factor geografis misalnya terjadi bencana alam atau kegagalan usaha.

b. Faktor internal bank

- 1) Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola/analisis pembiayaan.
- 2) Tidak adanya kebijakan pembiayaan pada bank yang bersangkutan.

Pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah dapat berjalan dengan lancar. Nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, nasabah dapat mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat pada tidak atau kurang lancarnya pembiayaan, yang bisa berujung pada kerugian bagi pihak bank syariah dan tidak menutup kemungkinan kerugian pada pihak nasabah. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan:

- a. Menerapkan standar pengendalian risiko, pencegahan risiko pembiayaan juga dilakukan melalui penganalisaan terhadap

character yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya, *capacity* yaitu penilaian kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran.

- b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan penjualan aset pembiayaan bermasalah (individu atau portofolio pembiayaan bermasalah). Aset atau pembiayaan bermasalah yang dapat dijual harus telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan.
- c. Penyelesaian melalui pihak ketiga yaitu badan peradilan yang berwenang menangani perselisihan/ Badan Arbitrase Syariah Nasional (*Non Litigasi*).

D. Dana Pihak Ketiga

1. Simpanan

Simpanan atau *Wadi'ah* dalam Bahasa Arab adalah perbuatan meletakkan barang kepada seseorang yang bukan pemiliknya. Dalam Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵⁵ yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati.⁵⁶

Simpanan menurut Kasmir merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk dititipkan di bank, dana tersebut kemudian dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan, seperti rekening giro, rekening tabungan, dan rekening deposito untuk kemudian diusahakan kembali dengan cara disalurkan ke masyarakat.⁵⁷

Berdasarkan definisi diatas, bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat/nasabah kepada pihak bank dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Allah SWT menjelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban menyampaikan amanat yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) secara adil.

2. Dana Pihak Ketiga

Pada manajemen perbankan, yang dimaksudkan Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan

⁵⁵ UU No 21 tentang perbankan syariah

⁵⁶ Pasal 1 angka (5) UU No 10 tahun 1998 Perbankan

⁵⁷ Kasmir. 2007. "Dasar-dasar Perbankan". Edisi 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.h 288

sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank tersebut jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Menurut UU Perbankan, sumber dana yang dimaksud dapat berupa Giro, Deposito dan Tabungan.

Modal yang dimiliki bank sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga (DPK) sesuai dengan salah satu fungsi bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat.⁵⁸ Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Dalam hal ini, nasabah menyimpan dananya dengan jumlah yang tidak ditentukan dan dana tersebut bisa digunakan oleh bank syariah untuk diputar kedalam pemberian pembiayaan agar mendapatkan bagi hasil yang nantinya akan dibagi kepada nasabah penyimpan.

Dalam penghimpunannya dalam perbankan syariah di tempuh dengan 2 metode, yaitu Wadi'ah dan Mudharabah. Jenis-jenis produk simpanan yang dipakai dalam Lembaga Keuangan Syariaiah adalah:

a. *Al-Wadiah*

Wadiah berasal dari kata *Al-Wadi'ah* yang berarti titipan murni (amanah).⁵⁹ Secara bahasa ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*mawudi'ah 'inda ghairi malikihi layahfadzahu*), berarti al-wadi'ah ialah memberikan makna

⁵⁸ Siamat, Dahlan. "Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Ketiga", Feui, Jakarta, 2001.

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dalam Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, h.

yang kedua al-wadi'ah dari segi bahasa ialah 'menerima'. Makna al-wadi'ah memiliki arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulihi*). sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya, tapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Yang dimaksud dengan "barang" disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di sisi Islam. Dengan demikian akad wadi'ah ini mengandung unsur amanah, kepercayaan (*trusty*). Dengan demikian, prinsip dasar *wadi'ah* adalah amanah, bukan dhamanah. *Wadiah* pada dasarnya akad *tabarru'*, (tolong menolong), bukan akad tijari.

b. Mudharabah/Dana investasi *non profit sharing*

Dana Simpanan Mudharabah adalah perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pemilik dan pembeli atau yang memanfaatkan produk. Ketentuan mengenai akad mudharabah yang diterapkan pada produk simpanan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 2 tahun 2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN MUI No. 3 tahun 2000 tentang Deposito. Fatwa-fatwa ini menyatakan bahwa nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana sedangkan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. .

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai dasar hukum praktik perbankan syariah di Indonesia juga menjelaskan akad mudharabah yang dilihat dari dua aktivitas yang berbeda, yaitu dalam hal penghimpunan dana serta dalam hal pembiayaan. Dalam konteks penghimpunan dana, yang dimaksud dengan akad mudharabah adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Dalam perbankan syariah, dikenal konsep mengenai akad mudharabah yang digunakan sebagai salah satu instrumen bagi perbankan dalam memobilisasi sebagian besar simpanan mereka atau yang biasa dikenal dengan profit sharing investment account (PSIA). Profit sharing investment account menurut IFSB mengacu pada produk simpanan yang disusun berdasarkan kontrak mudharabah (bagi hasil) di mana Investment Account Holder (IAH) dan lembaga perbankan syariah setuju untuk membagi laba yang dihasilkan dari aset yang didanai oleh PSIA berdasarkan rasio bagi hasil yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh IAH.

E. *Financial To Funding Ratio*

Financial to Funding Ratio (FFR). Merupakan kebijakan dengan menambahkan komponen surat berharga yang diterbitkan untuk menambah pendanaan selain dari dana pihak ketiga (DPK). Menurut Undang-undang No.24 Tahun 2002 komponen surat berharga yang diterbitkan antara lain:

1. Surat utang negara (SUN)

Surat utang negara (SUN) adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah berupa surat pengakuan utang dimana pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh Negara sesuai masa berlakunya.⁶⁰ Dalam penerbitannya surat utang negara (SUN) diterbitkan dalam bentuk warkat atau tidak warkat. Penerbitannya menggunakan berdasarkan perjanjian utang piutang yang berbasis pada sistem bunga. Macam-macam Surat utang negara (SUN):

- a) Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
- b) Obligasi Negara (ON)

2. Surat berharga syariah Negara (SBSN)

Surat berharga syariah Negara (SBSN) disebut juga sukuk Negara, yaitu surat berharga negara yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan *The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) No. 17 tentang investment sukuk (sukuk investasi). Sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang

⁶⁰ Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Kanisius, 2010, hlm. 253.

merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu *asset*, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu¹⁶. Sedangkan Jenis-jenis sukuk yang banyak beredar di pasaran meliputi :

- a) *Sukuk ijarah* yakni sukuk yang berdasarkan akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau dapat diwakili dalam menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
- b) *Sukuk mudharabah* yakni sukuk yang berdasarkan akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dan keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagikan berdasarkan perjanjian sebelumnya
- c) *Sukuk musyarakah* yakni sukuk berdasarkan akah musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing masing pihak.
- d) *Sukuk istisna'* yakni sukuk berdasarkan akad istisna' dimana pihak menyepakati jual beli dalam pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

Financial to Funding Ratio atau disingkat menjadi FFR. Perubahan ini ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013. rumus rasio *Financial to Funding Ratio* (FFR) sebagai berikut:

$$\text{FFR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{DPK} + \text{Surat Yang Diterbitkan}}$$

Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM FFR ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Batas bawah FFR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).
- 2) Batas atas FFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).

Peraturan tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui pertumbuhan pembiayaan perbankan, dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan GWM. Secara umum penetapan rasio likuiditas yang baik adalah lebih dari 92%. Besar kecilnya masing-masing rasio menentukan likuid dan tidak likuidnya suatu bank. Namun, bukan berarti semakin besar rasio likuiditas otomatis menunjukkan hasil yang baik, melainkan tergantung kepada masing-masing pengukuran dan kepentingan rasio itu sendiri pada pengukuran *Financial to Funding Ratio* (FFR).

Rasio Keuangan terhadap Pendanaan (FFR). Merupakan kebijakan untuk menambah komponen surat berharga yang diterbitkan untuk meningkatkan pendanaan selain dana pihak ketiga (DPK). Pengaturan tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui

pertumbuhan pembiayaan perbankan penyesuaian dilakukan terhadap kebijakan giro wajib minimum.⁶¹ Besar kecilnya setiap rasio menentukan likuiditas dan likuiditas suatu bank. Yang jelas diperlukan rasio pendanaan yang stabil, terutama dalam menghadapi krisis keuangan global.⁶²

Namun, bukan berarti semakin besar rasio likuiditas otomatis menunjukkan hasil yang baik, namun tergantung dari masing-masing pengukuran dan pentingnya rasio itu sendiri terhadap pengukuran Financial to Funding Ratio (FFR). Literatur mengungkapkan bahwa penerapan Net Stable Funding Ratio mampu meningkatkan stabilitas keuangan industri perbankan.⁶³ Studi lain menunjukkan bahwa selama krisis keuangan telah menunjukkan bagaimana risiko likuiditas akut, baik dalam hal risiko likuiditas pasar dan risiko pendanaan, dapat memanifestasikan dirinya di pasar keuangan. Lebih dalam, temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan memperhatikan risiko likuiditas dan interaksinya dengan risiko perbankan lainnya.⁶⁴

F. Rasio Intermediasi Makroprudensial

Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap formulasi RIM dan RIM Syariah melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga

⁶¹ Ashraf, D., L'Huillier, B., & Rizwan, MS (2015). *Apakah penerapan Net Stable Funding Ratio meningkatkan stabilitas keuangan industri perbankan*

⁶² Lallour, A., & Mio, H. (2016). Apakah Kita Membutuhkan Rasio Pendanaan yang Stabil? Pendanaan Banks dalam Krisis Keuangan Global . *Jurnal Elektronik SSRN* , (602)

⁶³ Ibid, hlm 112

⁶⁴ Chiaramonte, L., Casu, B., & Bottiglia, R. (2013). Penilaian Nilai Net Stable Funding Ratio (NSFR). Bukti dari Krisis Keuangan. *Perilaku Bank Modern* , 83–94

Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PBI RIM PLM).

Kebijakan makroprudensial sebenarnya sudah ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu, namun kebijakan ini kembali aktif digunakan setelah adanya krisis moneter pada tahun 2008. Bank Indonesia berasumsi bahwa dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang dirasa sangat tepat.

Otoritas makroprudensial dapat menargetkan tingkat tren jangka panjang dari rasio intermediasi dimana sektor perbankan berfungsi dengan baik dan tidak menghadapi risiko pendanaan yang berlebihan.⁶⁵ mengusulkan kebijakan makroprudensial untuk mencegah tingkat rasio LTD yang tidak berkelanjutan dan langkah-langkah kebijakan untuk melawan perkembangan siklus yang tidak stabil. Dalam hal ini, kompleksitas regulasi yang meningkat secara berlebihan membuat bank tidak stabil.⁶⁶ Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebijakan keuangan terkait makroprudensial harus fokus pada perbankan.

Studi sebelumnya yang meneliti efektivitas kebijakan makroprudensial dan interaksinya dengan kebijakan moneter menemukan bahwa ketiganya saling terkait. Ada empat instrumen makroprudensial, yaitu rasio maksimum loan-to-value (LTV), countercyclical capital buffer (CCB), dan rasio intermediasi makroprudensial dan makroprudensial (MIR). penyangga

⁶⁵ Van den End, JW (2016). *Pendekatan makroprudensial untuk mengatasi risiko likuiditas dengan rasio pinjaman terhadap simpanan*. *Jurnal Keuangan Eropa* , 22 (3), 237–253

⁶⁶ Neuberger, D., & Rissi, R. (2012). *Regulasi Perbankan Makroprudensial: Apakah Satu Ukuran Cocok Untuk Semua?* *Jurnal Elektronik SSRN* , (124).

likuiditas (MPLB).⁶⁷ Studi lain menemukan bahwa deregulasi keuangan makroprudensial menyebabkan perbaikan dan kinerja sektor perbankan.⁶⁸

Untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan dan manajemen likuiditas, dewan gubernur BI melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tanggal 3 April 2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial Dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan menambahkan komponen surat berharga untuk menghasilkan perhitungan RIM BUK dan RIM Syariah, fleksibilitas dalam penerapan PLM dan memperkenalkan instrumen kebijakan PLM Syariah bagi bank syariah.⁶⁹

Struktur pendanaan perbankan menunjukkan semakin luasnya alternatif sumber pendanaan bagi perbankan terutama berupa pinjaman atau pembiayaan yang diterima sehingga perlu untuk memperhitungkan sumber pendanaan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan yang diterima bank sehingga dapat dioptimalkan untuk penyaluran dana. Sehingga, bank dapat menyalurkan pendaannya bukan hanya melalui kredit tetapi juga dengan membeli surat berharga.

Besaran RIM ditargetkan dalam kisaran 80-92%.⁷⁰ Dengan kebijakan tersebut, Bank Indonesia senantiasa mengoptimalkan basaran kebijakan makroprudensial untuk menciptakan keseimbangan optimal antara stabilitas

⁶⁷ Wijayanti, R., Adhi P, NM, & Harun, CA (2018). Efektivitas Kebijakan Makroprudensial dan Interaksinya Dengan Kebijakan Moneter di Indonesia. *Kertas BIS*, (110), 31–50

⁶⁸ Lekshmi, P., & Ganesh, C. (2015). Regulasi Makroprudensial dan Kinerja Bank: Bukti dari India. *Sistem Cloud dalam Rantai Pasokan*, 150–166

⁶⁹ www.bi.go.id

⁷⁰ www.bi.go.id

makroekonomi dan sistem keuangan. Memperluas komponen pembiayaan yang memasukkan Surat-Surat Berharga yang dibeli oleh BUK, BUS, dan UUS, dan memperluas komponen simpanan dengan memasukkan SSB yang diterbitkan oleh BUS dan UUS.

Adapun target RIM adalah kisaran RIM yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM. Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas bawah Target RIM atau Target RIM Syariah sebesar 80% (delapan puluh persen)
- b. Batas atas Target RIM atau Target RIM Syariah sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).

Cakupan Kredit/Pembiayaan dan DPK untuk perhitungan RIM Syariah adalah Pembiayaan rupiah dan valas, DPK BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing yaitu:

- a. Dana simpanan wadiah
- b. Dana investasi tidak terikat, tidak termasuk dana antar bank.

Kriteria surat berharga yang dimiliki adalah dalam bentuk sukuk korporasi, diterbitkan oleh korporasi bukan bank dan oleh penduduk Ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (*public offering*). Memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi Ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek. Surat Berharga yg Dimiliki 100% oleh perbankan syariah.

Surat berharga yang diterbitkan dalam bentuk MTN syariah dan/atau sukuk selain sukuk subordinasi. Dimiliki bukan bank baik penduduk dan bukan penduduk Ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (*public offering*), memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi dan ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.

Pada pelaporan surat berharga Mekanisme penyampaian dilakukan secara *offline (email)*. Cakupan DPK untuk pemenuhan pemenuhan Giro RIM Syariah Rata-rata harian total DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah pada seluruh kantor BUS dan UUS di Indonesia yang meliputi kewajiban dlm rupiah kpd pihak ketiga bukan bank, baik kpd penduduk maupun bkn penduduk, yg terdiri atas dana investasi wadiah, dana investasi tidak terikat, dan kewajiban lainnya.

Kelonggaran atas Pemenuhan Giro RIM Syariah BI dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah terkait dengan penyaluran kredit/pembiayaan dan penghimpunan dana. Pemberian kelonggaran tersebut dilakukan atas dasar permintaan BUK, BUS, dan UUS serta mempertimbangkan rekomendasi OJK. Bagi BUK, BUS, dan UUS yang mendapatkan kelonggaran tersebut maka akan dikecualikan dari pengenaan sanksi.

G. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM).

Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) merupakan cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dan BUS dalam bentuk surat berharga dalam Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dan BUS dalam Rupiah.⁷¹

Besaran PLM Syariah (BUS) 4% dari DPK BUS dalam rupiah. Komponen Pemenuhan surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki BUS yang dapat digunakan dalam operasi moneter syariah (antara lain SBIS/SBSN).

1. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Peraturan Bank Indonesia no 2/9/PBI/2000 mengatur tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.

2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing.

⁷¹ www.bi.go.id

Sesuai dengan karakteristik instrumen makroprudensial, besaran MLB dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan hasil penilaian kondisi ekonomi dan likuiditas perbankan. Jika dinilai membanjiri likuiditas, jumlah MLB akan ditingkatkan agar bank dapat membangun cadangan dan mempersiapkan likuiditas untuk kemudian dalam kondisi pengetatan likuiditas cadangan likuiditas ini dapat digunakan.⁷² Sebagai tambahan fitur dalam PLM, dalam kondisi tertentu Bank Indonesia memberi fleksibilitas pada bank untuk merepotkan sebagian PLM yang dimiliki kepada bank sentral untuk membantu kesulitan likuiditas yang sifatnya hanya sementara.

Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk upaya Bank Indonesia untuk tetap mendorong intermediasi perbankan dengan tetap memperhatikan aspek prudensialitas likuiditasnya. PLM merupakan instrumen likuiditas makroprudensial yang diterbitkan Bank Indonesia untuk mencegah munculnya risiko sistemik dari sisi likuiditas. PLM akan berfungsi sebagai penyangga atau cadangan likuiditas, dipupuk ketika kondisi likuiditas tinggi dan dapat digunakan ketika likuiditas ketat. Keberadaan PLM juga memperkuat bentuk pengawasan makroprudensial mengingat sifat instrumen yang dapat disesuaikan besarannya sewaktu-waktu serta diterapkan pada seluruh bank. Diharapkan, instrumen baru ini dapat mendukung upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Fleksibilitas PLM Syariah (BUS) Dalam kondisi tertentu, surat berharga yang digunakan untuk memenuhi PLM Syariah dapat digunakan

⁷² Shihabudin, S., Sanjoyo, S., & Hendayana, Y. (2021). Pendahuluan, 5 (April), hlm, 1–24

dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka, dengan jumlah paling banyak ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUS dalam rupiah. Sumber Data PLM Syariah (BUS) DPK BUS dalam rupiah untuk pemenuhan PLM Syariah diperoleh dari LBBUS. DPK BUS dalam rupiah untuk perhitungan PLM Syariah adalah rata-rata harian total DPK BUS dalam rupiah pada seluruh kantor BUS di Indonesia. Dan DPK BUS dalam rupiah meliputi:

- a. Dana simpanan wadiah
- b. Dana investasi tidak terikat
- c. Kewajiban lainnya.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) juga memiliki fitur fleksibilitas, yang berarti pada kondisi tertentu surat berharga tersebut dapat digunakan untuk transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam Operasi Pasar Terbuka sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dan BUS dalam Rupiah. Kebijakan PLM/PLM Syariah diharapkan mengatasi permasalahan prosiklialitas likuiditas serta menjadi instrumen makroprudensial berbasis likuiditas yang berlaku untuk seluruh bank. PLM wajib dipenuhi oleh Bank Umum Konvensional dan Unit Usaha Syariah, sedangkan PLM Syariah wajib dipenuhi oleh Bank Umum Syariah Ketentuan terkini mengenai PLM/PLM Syariah dapat dilihat pada:

- a. PBI No.20/4/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

- b. PADG No.20/31/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang “Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah” (Perubahan PADG RIM dan PLM)

H. *Mashlahah dan Falah*

Pada Bank yang berprinsip pada nilai-nilai syari'ah. Sebagaimana, tujuan yang ingin dicapai ekonomi Islam yaitu *mashlahah* (menciptakan kehidupan yang lebih baik) dan mencapai *falah* (kemenangan dunia dan akhirat). Konsep *al-falah* dalam Islam dapat dipahami maksudnya dilihat dari segala sisi. Bersifat komprehensif bagi kelangsungan kehidupan manusia. Ia mencakup kebahagiaan spiritual, ruhiyah, badaniyah, secara zahir dan batin.⁷³ Yang artinya tujuan utama *al-falah* dalam islam bukan hanya kebahagiaan yang dirasakan untuk kehidupan dunia saja melainkan jauh kedepan yaitu mendapatkan kebahagiaan di akhirat.

Pengaplikasian syariah di segala bidang ekonomi Islam tersebut penting untuk dilakukan terutama pada perbankan syariah karena bank syari'ah merupakan subsistem dari ekonomi Islam, dimana tujuan dari Ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah*.⁷⁴ *al-falah* menuntut seorang muslim untuk berorientasi pada Masalahah dalam setiap aktivitasnya. Jika

⁷³ Khaerul Aqbar, *Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi*, Ustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 3 (2020): Hal. 516-531

⁷⁴ Sri Mulyani, *Analisis Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia Tahun 2012-2016)*, Jurnal Al-Iqtishod, Volume 1 No. 1 Juni 2019.hlm 23

seseorang menggunakan ukuran masalah dalam aktivitas ekonominya baik dalam kegiatan produksi, konsumsi maupun distribusi. Sehingga, tujuan bank syariah adalah menjunjung tinggi tujuan sosial, mempromosikan nilai-nilai Islam kepada stakeholder, memberikan kontribusi kesejahteraan sosial, mendukung keberlangsungan ekonomi dan berusaha mengentaskan kemiskinan.⁷⁵

Konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Oleh karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist serta Ijma. Ekonomi Islam dilakukan dalam semua inti kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi barang maupun jasa. Dalam bisnis ekonomi Islam tidak mengenal adanya bunga seperti halnya pada kegiatan ekonomi konvensional melainkan mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* yang disepakati bersama antar pihak.⁷⁶ Seperti dalam QS. Ibrahim (14): 32 sebagai berikut:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan

⁷⁵ Wadji Asyraf Dusuki. *Understanding The Objectives Of Islamic Banking: A Survey Stakeholder Perspective, International Journal Of Islamic and Middle Eastern Finance And Management*, Vol.1, No. 2. 2008. hlm 134

⁷⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 26-27.

*dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu”.*⁷⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memaparkan segala kenikmatan atas rezeki yang harus diupayakan bagi setiap manusia dalam setiap aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setiap aktivitas ekonomi yang diupayakan seseorang apabila di dalam memulai usahanya mengalami kesulitan modal maka dengan kerjasama dalam permodalan akan dapat membantu. Dalam kerjasama tersebut terdapat beberapa prinsip, yaitu prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip kebenaran dan prinsip tolong-menolong.

Tugas pokok bank yang memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.⁷⁸ Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, bahwa Perbankan syariah mempunyai fungsi sebagai perantara/penyaluran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya) kepada pihak yang kekurangan/membutuhkan dana (masyarakat). Selain sebagai penyalur dana perbankan syariah juga berfungsi sebagai penghimpun dana. Allah SWT menjelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,*

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 259.

⁷⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 113.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban menyampaikan amanat yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) secara adil. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah QS al-Anfal/8: 27. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Islam atau dalam konteks syariah memiliki sudut pandang sendiri berkaitan dengan pertanggungjawaban, karena dalam Islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah amanah.⁷⁹

Dana yang dipercayakan masyarakat membutuhkan sebuah konsep amanah yang mampu untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak sesuai norma dan tata aturan yang maslahat. Konsep yang dimaksud disini adalah konsep yang mampu untuk menjadi standar dalam pengelolaan harta (*asset*) dengan kesesuaian konsep syariah yang sebenarnya. Disini amanah yang dimaksudkan akan lebih terarah pada konsep penjagaan harta(*asset*) atau *al-mal* yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau pada hakikat syariah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Yunus/10: 55.

⁷⁹ Masiyah Kholmi, "Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam". *Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15. no 1, Juni 2012.

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: *Ingatlah, Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, Sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya).*⁸⁰

Ayat di atas jelas memberikan pemahaman bahwa segala apa yang ada dalam bumi ini merupakan kepemilikan Allah SWT. Jadi pemahaman yang sewajarnya muncul adalah dalam pengelolaan *asset* itu harus sesuai dengan konsep yang ditentukan oleh sang pemiliknya atau yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang sewajarnya yaitu terhadap Allah, Manusia, dan Alam (trilogi akuntabilitas).

Dana selanjutnya disalurkan melalui pembiayaan. berbagai alternatif instrumen pembiayaan, seperti dengan surat berharga yang tentunya harus sesuai dengan konsep islam surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah guna memobilisasi dana publik secara luas telah dilaksanakan oleh pemerintah. Instrumen keuangan yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan kepastian hukum, transparan, dan akuntabel.

Instrumen yang ada pada perbankan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, *thayyib*, dan maslahat. Selain itu, transaksi dalam keuangan Islam sesuai dengan syariah harus terbebas dari unsur larangan berikut:

⁸⁰ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, hal. 216.

- a. Riba, yaitu unsur bunga atau *return* yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (*money for money*)
- b. Maysir, yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan
- c. Gharar, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas, dan sebagainya.

Seperti dalam QS. An-Nisa (4): 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁸¹

Pada proses pembiayaan idealnya dilakukan sesuai dengan apa yang diperjanjikan namun dalam perjalanan mengalami hambatan dan perlu diselesaikan segera. Dasar yang dapat mendukung upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan apabila nasabah masih mempunyai *i'tikad* baik dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 83.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِن تَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۖ.....

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa).....

Berdasarkan ayat di atas, menekankan pentingnya toleransi/ditangguhkan terhadap nasabah yang sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) sampai dia berkelapangan, sedekah kepada yang membutuhkan dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

I. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, acuan dan pertimbangan untuk peneliti, berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Agustinar,⁸² Analisis pengaruh DPK, NPF, SWBI dan surat berharga pasar uang syariah terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di indonesia (Periode 2010-2014). Menunjukkan semua variabel bebas (independent variabel) yang digunakan dalam estimasi model analisis ini, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Surat Berharga Pasar Keuangan Syariah

⁸² Agustinar,⁸² Analisis pengaruh DPK, NPF, SWBI dan surat berharga pasar uang syariah terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di indonesia (periode 2010-2014), *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 2, 2016: 264-290, h 264-265

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan (berarti) terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Fitria Rahmah,⁸³ Analisis Dampak Penerbitan SBSN Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sukuk berpengaruh negatif namun signifikan terhadap profitabilitas bank syariah,

Seandy Nandadipa,⁸⁴ Analisis pengaruh CAR, NPL, inflasi, pertumbuhan DPK, dan *exchange rate* terhadap LDR, Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara simultan CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK dan *Exchange Rate* dengan uji F, berpengaruh signifikan terhadap LDR. Hasil secara parsial CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK dan *Exchange Rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR, sedangkan variable pertumbuhan DPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap LDR.

Hersugondo dan Handy Setyo Tamtomo,⁸⁵ Pengaruh CAR, NPL, DPK dan ROA terhadap LDR perbankan Indonesia, Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa selama periode penelitian secara parsial *Non Performing Loan* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR perusahaan, sedangkan Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap LDR perusahaan.

Dhea Ade Sri Handayani dan Nurdin,⁸⁶ melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) terhadap *Return*

⁸³ Fitria Rahmah, *Analisis Dampak Penerbitan Sbsn Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Tahun 2017, Vol. 3, No. 1,

⁸⁴ Seandy Nandadipa, *Analisis pengaruh car, npl, inflasi, pertumbuhan dpk, dan exchange rate terhadap LDR, tahun 2010*, h 89

⁸⁵ Hersugondo dan Handy Setyo Tamtomo, *Pengaruh CAR, NPL, DPK dan ROA terhadap LDR perbankan Indonesia* Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang, h 62

⁸⁶ Dhea Ade Sri Handayani dan Nurdin, *Pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)*

on Asset (ROA) pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Rata-rata perkembangan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada 15 sampel perbankan yang digunakan dalam penelitian ini pada menunjukkan bahwa rata-rata bank yang diteliti memiliki RIM yang kurang sehat karena kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat lemah.

Arief Fitriant⁸⁷ Dengan judul Pengaruh Sektor Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap *Financial Deepening* Di Indonesia, hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Syariah, Sukuk Negara, Sukuk Korporasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Financial Deepening di Indonesia. Secara partial, penelitian ini menunjukan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Financial Deepening, sedangkan pada Pembiayaan Syariah tidak berpengaruh terhadap Financial Deepening. Selain itu hasil penelitian ini menunjukan Sukuk Korporasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap Financial Deepening, dan untuk Sukuk Negara yang berarti secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Financial Deepening di Indonesia.

Gantiah Wuryandani, dkk⁸⁸ melakukan penelitian dengan judul “pengelolaan dana dan likuiditas bank”, menunjukkan bahwa penghimpunan

terhadap Return on Asset (ROA) pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Volume 5, No. 1, Tahun 2019, h 190

⁸⁷ Ami Latifah dan Arief Fitriant, *Pengaruh Sektor Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 7, Nomor 2, September 2016, h 128

⁸⁸ Gantiah Wuryandani, dkk, *pengelolaan dana dan likuiditas bank*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Januari 2014, h 264.

dan pengelolaan dana perbankan mempengaruhi keputusan likuiditas perbankan. kondisi involuntary liquidity lebih dipengaruhi oleh kondisi sistem keuangan. Likuiditas *involuntary* terdiri dari rasio surat berharga yang dapat diperdagangkan baik surat berharga bank sentral, pemerintah maupun surat berharga lainnya terhadap asset. Likuiditas *involuntary* cenderung lebih digunakan sebagai penyangga likuiditas operasional oleh bank. Hal ini terindikasi dari lebih berpengaruhnya situasi di pasar keuangan terhadap likuiditas *involuntary*.

Ibnudin,⁸⁹ melakukan penelitian dengan judul “prinsip pengelolaan likuiditas bank syariah” menunjukkan bahwa Instrument yang harus dilakukan bank agar senantiasa dapat tetap likuid adalah Memiliki Secondary Reserve Yaitu cadangan yang berfungsi sebagai penyangga Primary Reserve. Adapun cadangan sekunder berupa surat-surat berharga bisa berupa Berharga Syariah Negara (SBSN) dll.

J. Kerangka Berpikir

Pengelolaan likuiditas dalam lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang menjadi prioritas utama, Secara garis besar likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu memperkirakan kebutuhan dana, yang berasal dari penghimpunan dana (*deposit inflow*) dan untuk penyaluran dana (*fund out flow*) dan berbagai komitmen pembiayaan (*finance commitments*).

Prihatiningsih (2012) bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap likuiditas (FDR). Hal ini dapat diketahui pula bahwa perubahan-perubahan

⁸⁹ Ibnudin, *prinsip pengelolaan likuiditas bank syariah*, Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016, h 76.

tingkat variabel NPF memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fikriati (2015) bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap likuiditas (FDR) dan pada penelitian Susilowati (2016) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas.

Abdul Mongid (2008) Pertumbuhan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pemberian kredit. Hersugondo dan Handy Setyo Tamtomo⁹⁰ Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap LDR. Agustinar, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Surat Berharga Pasar Keuangan Syariah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan (berarti) terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.

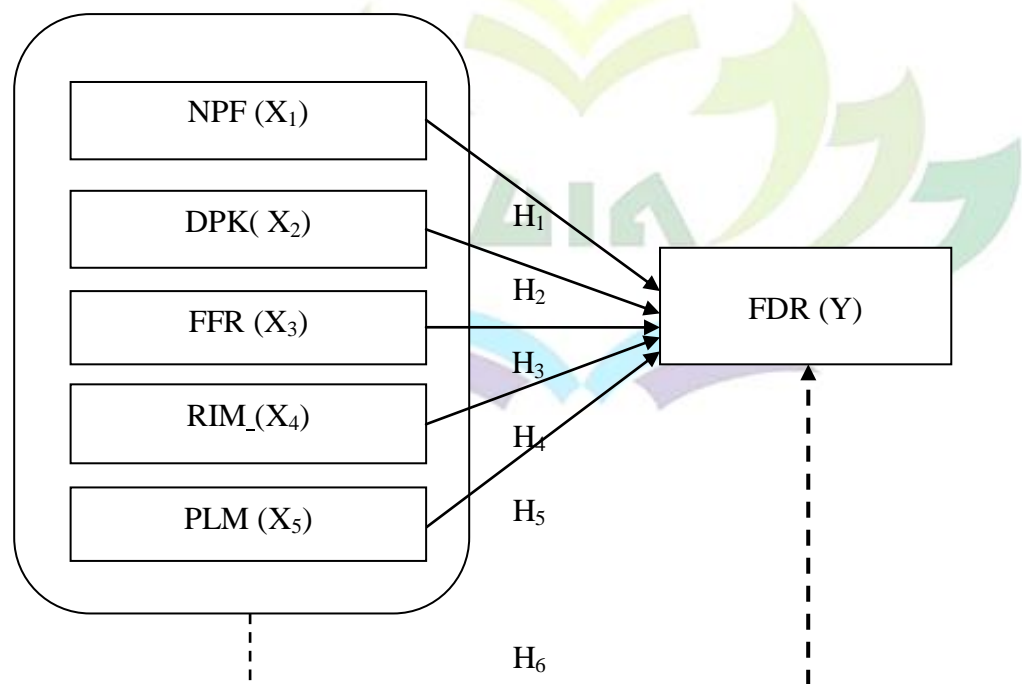
Pemilihan variabel likuiditas pada sektor perbankan didasarkan pada aktivitas atau kegiatan utama perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga yang dihimpun kemudian perbankan menyalurkan dana tersebut sebagai pembiayaan. Sedangkan instrument surat berharga pada perbankan syariah merupakan alternative pembiayaan. Semakin meningkatnya peranan sektor perbankan melalui peningkatan kontribusi, dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan, surat berharga dan cadangan perbankan sehingga dapat mempengaruhi likuiditas perbankan syariah.

⁹⁰ Hersugondo dan Handy Setyo Tamtomo, *Pengaruh CAR, NPL, DPK DAN ROA Terhadap Ldr Perbankan Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang. Hlm

Mengusik peneliti untuk mengkaji lebih dalam apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap likuiditas, apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap likuiditas apakah *Financial To Funding Ratio* berpengaruh terhadap likuiditas, apakah Rasio Intermediasi Makroprudensial berpengaruh terhadap likuiditas, dan apakah Penyangga Likuiditas Makroprudensial berpengaruh terhadap likuiditas.

Berdasarkan pada landasan teori diatas, serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar. 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- ▶ Secara individu
- - - - -▶ Secara bersama-sama

K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.⁹¹ Sedangkan Sugiyono mendefinisikan bahwa, Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan *sementara*, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiric.⁹² Berdasarkan latar belakang masalah, Landasan Teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis penelitian ini terdiri dari:

1. *Non Performing Financing* terhadap likuiditas bank syariah

Non Performing Financing merupakan keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar kewajiban terhadap perjanjian. Rasio pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank. berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H_0 : *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap likuiditas

H_1 : *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap likuiditas

⁹¹ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 135.

⁹² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung. 2015., Hlm 64.

2. Dana Pihak Ketiga terhadap likuiditas bank syariah

Seandy Nandadipa,⁹³ Analisis pengaruh CAR, NPL, inflasi, pertumbuhan DPK, dan *exchange rate* terhadap LDR, Hasil pembahasan Pertumbuhan DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR, Hasil penelitian ini mendukung penelitian Satria dan Subegtin (2010)⁹⁴ tidak menemukan bukti bahwa DPK berpengaruh terhadap LDR.

H_0 : Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap likuiditas

H_1 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap likuiditas

3. *Financial To Funding Ratio* terhadap likuiditas bank syariah

Financial to Funding Ratio merupakan kebijakan dengan menambahkan komponen surat berharga yang diterbitkan untuk menambah pendanaan selain dari dana pihak ketiga (DPK). Bank syariah sebagai salah satu bagian dari industri keuangan di Indonesia. Surat Berharga berlandaskan prinsip syariah merupakan aset yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah sebagai alat likuiditas. Berbagai manfaat dari penyaluran dana bank melalui SBSN adalah memberikan peluang kepada bank syariah untuk melakukan diversifikasi dana ke berbagai instrumen sehingga dapat membantu meminimalisir risiko likuiditas yang dihadapi. Maharani Ika Lestari & Toto Sugiharto⁹⁵ (2007) Suku Bunga

⁹³ Seandy Nandadipa, ⁹³ Analisis pengaruh *car*, *npl*, inflasi, pertumbuhan *dpk*, dan *exchange rate* terhadap *LDR*, tahun 2010, h 89

⁹⁴ Satria & Subegti, R. B, 2010. *Determinasi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia Periode 2006-2009*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 14, No.3, September.

⁹⁵ Maharani, Ika Lestari dan Sugiharto, Toto. 2007. *Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil). Vol.2. A195-!201.

SBI berpengaruh terhadap LDR. Pontes dan Sol Murta.⁹⁶ bahwa perkembangan kredit, surat berharga pemerintah mempengaruhi keputusan likuiditas bank.

H_0 : Financial To Funding Ratio tidak berpengaruh terhadap likuiditas

H_1 : Financial To Funding Ratio berpengaruh terhadap likuiditas

4. Rasio Intermediasi Makroprudensial terhadap likuiditas bank syariah.

Struktur pendanaan perbankan menunjukkan semakin luasnya alternatif sumber pendanaan bagi perbankan terutama berupa pinjaman atau pembiayaan yang diterima sehingga perlu untuk memperhitungkan sumber pendanaan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan yang diterima bank sehingga dapat dioptimalkan untuk penyaluran dana. Sehingga, bank dapat menyalurkan pendaannya bukan hanya melalui pembiayaan tetapi juga dengan membeli surat berharga. Dhea Ade Sri Handayani dan Nurdin,⁹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Rata-rata perkembangan Rasio Intermediasi Makroprudensial pada 15 sampel perbankan yang digunakan dalam penelitian ini pada bulan Juli-September 2018 secara berturut-turut adalah sebesar 105,55%, 106,07%, dan 106,51% melebihi batas atas target RIM yaitu diatas 92%.

H_0 : Rasio Intermediasi Makroprudensial tidak berpengaruh terhadap likuiditas

H_1 : Rasio Intermediasi Makroprudensial berpengaruh terhadap likuiditas

⁹⁶ Pontes, G. and Sol Murta, F. 2012. *The determinants of the bank's excess liquidity and the credit crisis: the case of Cape Verde*. Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

⁹⁷ Dhea Ade Sri Handayani dan Nurdin, *Pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) terhadap Return on Asset (ROA) pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, Volume 5, No. 1, Tahun 2019, h 190

5. Penyangga Likuiditas Makroprudensial terhadap likuiditas bank syariah.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) merupakan cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dan BUS dalam bentuk surat berharga dalam Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dan BUS dalam Rupiah.

H_0 : Penyangga Likuiditas Makroprudensial tidak berpengaruh terhadap likuiditas

H_1 : Penyangga Likuiditas Makroprudensial berpengaruh terhadap likuiditas

6. Pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, *Financial To Funding Ratio*, Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Terhadap likuiditas.

Hasil penelitian Mayvina Surya Mahardhika Utami & Muslikhati,⁹⁸ menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat likuiditas. Sedangkan secara parsial DPK dan NPF mempunyai pengaruh yang signifikan. Ihwan Hadi Sunarno, Rifki Ismal, dan Dian Handayani,⁹⁹ investor yang berinvestasi pada instrumen keuangan

⁹⁸ Mayvina Surya Mahardhika Utami & Muslikhati, *Analisis terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap likuiditas yang ada pada Bank Umum Syariah Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4, No.1, Februari 2019, h 41-42

⁹⁹ Ihwan Hadi Sunarno, Rifki Ismal, dan Dian Handayani, *Apa yang Mempengaruhi Investor Sukuk Negara dalam Menentukan Liquidity Premium, Kajian Ekonomi & Keuangan* Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2019, h 135

syariah seperti sukuk mempertimbangkan faktor risiko likuiditas dalam menentukan *expected return* dari sukuk dalam jangka pendek (t-3). Pontes dan Sol Murta.¹⁰⁰ bahwa perkembangan kredit, surat berharga pemerintah mempengaruhi keputusan likuiditas bank. Tingginya suku bunga pembiayaan menyebabkan terhambatnya intermediasi bank sehingga likuiditas menumpuk.

Hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H₀ : Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, *Financial To Funding Ratio*, Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial secara bersama-sama tidak berpengaruh Terhadap likuiditas.

H₁ : *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, *Financial To Funding Ratio*, Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial secara bersama-sama berpengaruh Terhadap likuiditas .

¹⁰⁰ Pontes, G. and Sol Murta, F. 2012. *The determinants of the bank's excess liquidity and the credit crisis: the case of Cape Verde. Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra*. Hlm, 35

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Agustinar, *Analisis pengaruh DPK, NPF, SWBI dan surat berharga pasar uang syariah terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di indonesia (periode 2010-2014)*, Analytica Islamica, Vol. 5, No. 2, 2016
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Avabet, Jakarta, 2002.
- Arthesa , Ade, dan Handiman, Edia. "Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank".PT Index, Jakarta, 2006.
- Ashraf, D., L'Huillier, B., & Rizwan, MS (2015). *Apakah penerapan Net Stable Funding Ratio meningkatkan stabilitas keuangan industri perbankan*
- Ami Latifah dan Arief Fitriant, Pengaruh Sektor Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam Volume 7, Nomor 2, September 2016
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010)
- Chiaramonte, L., Casu, B., & Bottiglia, R. (2013). Penilaian Nilai Net Stable Funding Ratio (NSFR). Bukti dari Krisis Keuangan. *Perilaku Bank Modern*
- Dendawijaya, L. (2015). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indah.
- Dhea Ade Sri Handayani dan Nurdin, Pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) terhadap Return on Asset (ROA) pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Volume 5, No. 1, Tahun 2019
- Ding, L., & Reid, CK (2020). Community Reinvestment Act (CRA) dan Pola Percabangan Bank. *Debat Kebijakan Perumahan*
- Eduardus Tandelilin, Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Kanisius, 2010.
- Eungene F Brigman dan Joel F Houaton, Manajemen Keuangan (Jakarta: Erlangga, 2001)
- Fahmi, Irham. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta. 2015
- Friedline, T., Franklin, T., Morrow, S., & Kugiya, J. (2020). Janji dan bahaya kesepakatan manfaat masyarakat: bukti dari komentar publik hingga merger bank besar. *Jurnal Praktek Komunitas* ,
- Fitria Rahmah, ¹Analisis Dampak Penerbitan Sbsn Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Tahun 2017
- Gantiah Wuryandani, dkk. pengelolaan dana dan likuiditas bank. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Januari 2014*

Fitriyah, TN (2020). Perkembangan Perbankan Syariah dan Kontribusinya dalam Pembangunan Perbankan Nasional. *Jurnal Internasional Islam Nusantara* ,
Hersugondo dan Handy Setyo Tamtomo, Pengaruh CAR, NPL, DPK dan ROA terhadap LDR perbankan indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang,

Hughes, L., Dwivedi, YK, Misra, SK, Rana, NP, Raghavan, V., & Akella, V. (2019). Penelitian, praktik, dan kebijakan Blockchain: Aplikasi, manfaat, batasan, tema penelitian yang muncul, dan agenda penelitian. *Jurnal Internasional Manajemen Informasi* , 49 (Februari)

Hersugondo dan Handy Setyo Tamtomo, Pengaruh CAR, NPL, DPK DAN ROA Terhadap Ldr Perbankan Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang.

Istan, M., & Fahlevi, M. (2020). Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*

Ibnudin, prinsip pengelolaan likuiditas bank syariah, Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana. *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*.

Ikatan Bankir Indonesia, Bisnis Kredit Perbankan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2015)

Jagtiani, J., Kotliar, I., & Maingi, RQ (2016). Merger bank komunitas dan dampaknya terhadap pinjaman usaha kecil. *Jurnal Stabilitas Keuangan* , 27 (Desember 2013),

Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Yogyakarta: BPPE UGM, 2000)

Kamal, Rendy. (2014). *Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Laba Perbankan Syariah Di Indonesia Periode September 2009-Desember 2013*.

Kasmir. 2007. "Dasar-dasar Perbankan". Edisi 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kisman, Z. (2020). Manajemen Risiko: Studi Banding antara Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*

Lallour, A., & Mio, H. (2016). Apakah Kita Membutuhkan Rasio Pendanaan yang Stabil Pendanaan Banks dalam Krisis Keuangan Global . *Jurnal Elektronik SSRN* ,

Lisa Marlina JN dan Mia Angelina Setiawan. *Pengaruh Kurs, Inflasi, Dana Pihak Ketiga (Dpk), Pendapatan Bank, Capital Adequacy Ratio (Car), Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank*

Umum Syariah Non Devisa Periode 2014-2018 Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 3, Seri E, Agustus 2019

Lekshmi, P., & Ganesh, C. (2015). Regulasi Makroprudensial dan Kinerja Bank: Bukti dari India. *Sistem Cloud dalam Rantai Pasokan*

Maharani, Ika Lestari dan Sugiharto, Toto. 2007. “Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya”. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil)*. Vol.2.

Masiyah Kholmi, “Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam”. *Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15. no 1, Juni 2012.

Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Muhamad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012)

Nugroho, M., Arif, D., & Halik, A. (2021). Pengaruh provisi kerugian pinjaman, kredit bermasalah dan dana pihak ketiga terhadap rasio kecukupan modal. *Akuntansi* .

Nurul Ichsan. *Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah*. 2013.

Nandadipa, Seandy dan Prastiono, 2010. *Analisis Pengaruh CAR, NPL, INFLASI, Pertumbuhan DPK, dan Exchange Rate terhadap LDR*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Neuberger, D., & Rissi, R. (2012). Regulasi Perbankan Makroprudensial: Apakah Satu Ukuran Cocok Untuk Semua? *Jurnal Elektronik SSRN* ,

Rini, RDP, Balafif, M., & Imamah, N. (2021). Pengaruh Tingkat Inflasi, Kurs IDR, CAR dan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2017. *Bharanomi*

Riantani, S., & Dyahrini, W. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Komputer dan Matematika Turki* ,

Riyadi, Slamet. *Banking Assets and Liability Management*, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

Satria & Subegti, R. B, 2010. *Determinasi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia Periode 2006-2009*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol 14, No.3, September.

Siamat, Dahlan, 2003, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.

Seandy Nandadipa, Analisis pengaruh *car*, *npl*, inflasi, pertumbuhan *dpk*, dan *exchange rate* terhadap *LDR*, tahun 2010

Shopy Nadia. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah*. 2010

Syafril, H. (2018). *Penentu kinerja keuangan bank syariah di indonesia selama periode 2014-2018: analisis keuangan berdasarkan metodologi unta*

Sony Kristiyantodan Sugeng Widodo, *Analisa Intermediasi Makroprudensial Pada Bank Berdampak Sistemik di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Dewantara, Vol. 3 No. 1, Januari 2020-Juli 2020

Sri Mulyani, Analisis Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia Tahun 2012-2016), Jurnal Al-Iqtishod, Volume 1 No. 1 Juni 2019

Siamat, Dahlan. "Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Ketiga", Feui, Jakarta, 2001 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dalam Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001

Shihabudin, S., Sanjoyo, S., & Hendayana, Y. (2021). Pendahuluan, 5 (April), hlm, 1–24 Khaerul Aqbar, Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi.

Taujiharrahman, D., Yuningrum, H., Yahya, I., Zaki Fuadi, N., & Hartono, S. (2021). Analisis Rasio Likuiditas Bank Syariah Selama Pandemi Virus Covid-19

Umiyati, LMMK (2020). Islamic Corporate Governance dan Kepatuhan Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Al-IQTISHAD: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12 no. 1 (Jan-juni 2020),

Pontes, G. and Sol Murta, F. 2012. The determinants of the bank's excess liquidity and the credit crisis: the case of Cape Verde. Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Van den End, JW (2016). Pendekatan makroprudensial untuk mengatasi risiko likuiditas dengan rasio pinjaman terhadap simpanan. *Jurnal Keuangan Eropa*

Wadji Asyraf Dusuki. Understanding The Objectives Of Islamic Banking: A Survey Stakeholder Perspective, International Journal Of Islamic and Middle Eastern Finance And Management, Vol.1, No. 2. 2008

Wijayanti, R., Adhi P, NM, & Harun, CA (2018). Efektivitas Kebijakan Makroprudensial dan Interaksinya Dengan Kebijakan Moneter di Indonesia. *Kertas BIS*

UU No 21 tentang perbankan syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018

PBI No. 15/15/PBI/2013

Pasal 1 angka (5) UU No 10 tahun 1998 Perbankan

Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2018

www.bi.go.id

www.bei.go.id

